

Agenda Riset Perkoperasian Indonesia: Identifikasi Isu dan Tema Riset Prioritas dalam 10 Tahun Mendatang

Audito Aji Anugrah¹ dan Firdaus Putra²

¹ Kepala Divisi Manajemen Pengetahuan dan ² Ketua Komite Esekutif
Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI)
audito@icci.id, firdaus@icci.id

ABSTRACT

This research is an effort to formulate a research agenda for cooperatives in Indonesia. The aim is to map the issues and mix of themes that are relevant in the context of cooperatives in Indonesia with a time horizon of the next 10 years. The method used is survey and literature review. Researchers found various themes with efforts to fill the gap between the needs from the perspective of stakeholders (academics, government, cooperatives and other actors of the cooperative ecosystem). This research can be used as a framework for future research to be more focused, contextual and relevant.

Keyword: Cooperative research agenda, strategic issues, research theme mix

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan upaya untuk merumuskan agenda riset perkoperasian di Indonesia. Tujuannya untuk memetakan isu serta bauran tema yang relevan sesuai konteks perkoperasian di Indonesia dengan horizon waktu 10 tahun mendatang. Metode yang digunakan adalah survei dan kajian literatur. Peneliti menemukan berbagai tema dengan upaya mengisi celah antara kebutuhan dari perspektif para pemangku kepentingan (akademisi, pemerintah, koperasi dan pelaku ekosistem perkoperasian lain). Penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka kerja bagi riset-riset mendatang agar lebih terarah, kontekstual dan relevan.

Kata kunci: Agenda riset koperasi, isu strategis, bauran tema riset

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu entitas bisnis yang kini berkembang dan bertumbuh pesat. Hal tersebut tak lepas dari peranan pengaruh dan daya dukung oleh banyak faktor didalam ekosistem model bisnis tersebut. Perkembangan ekosistem model bisnis tersebut tentunya saling mempengaruhi antar satu aspek dengan aspek lain didalamnya. Aspek tersebut diantaranya dipengaruhi dari faktor internal (organisasi, tata kelola, bisnis, permodalan dan lain sebagainya). Namun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal (kebijakan, ekonomi, teknologi sosial dan lain sebagainya). Adanya aspek faktor internal dan eksternal dari ekosistem model bisnis koperasi menjadi sangat penting untuk dikaji melalui kegiatan riset.

Keberadaan riset menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dan mendukung perkembangan dan pengembangan koperasi. Riset memberikan manfaat bagi koperasi serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang kondisi fenomena yang terjadi serta bentuk respon terhadap fenomena tersebut. Kondisi fenomena tersebut merujuk pada konteks level mikro, meso, makro dan mega perkoperasian dengan isu-isu spesifik. Hasil keluarannya, riset berupaya untuk memberi informasi, analisa serta wawasan sebagai fundamental bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merespon dan mengambil sebuah keputusan (kebijakan).

Riset seringkali dihadapkan dengan beberapa problematika kontekstual isu. Dalam mengupayakan riset berangkat dari sebuah konteks isu, masalah dan tantangan konkrit yang terjadi di

Indonesia, maka perlu disusun sebuah Agenda Riset yang sistemik dan terarah untuk perkoperasian di Indonesia. Sehingga dengan adanya Agenda Riset yang tersistemik dan terarah akan membawa dampak terhadap perkoperasian Indonesia untuk dapat berbenah dan berkembang.

Upaya menyusun Agenda Riset Perkoperasian Indonesia yang menjawab kontekstualitas permasalahan yang ada di Indonesia saat ini menjadi sebuah urgensi yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pasalnya, belum tersedia Agenda Riset Perkoperasian di Indonesia sebagai peta jalan dan kerangka yang dapat digunakan oleh para akademisi dan peneliti di Indonesia. Untuk mencapai sistemik dan terarah maka diperlukan agenda dalam menentukan sebuah pilihan tema penelitian yang akan ditentukan

Tanpa agenda yang terarah itu, pilihan tema serta hasil riset menjadi tidak menjejak dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Ujungnya riset hanya bersirkulasi di antara para peneliti dan menumpuk di antara jurnal-jurnal ilmiah. Sehingga keilmuan yang dihasilkan tidak dapat terimplementasi dengan baik secara praksis serta tidak ada keterkaitan dan keterhubungan.

Di beberapa negara lainnya telah merumuskan agenda riset rumusan agenda tersebut berangkat dari konteks serta kondisi koperasi yang berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Sehingga kami, *Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI)*, merasa perlu untuk merumuskan agenda riset perkoperasian yang relevan bagi Indonesia. ICCI selaku sebagai *knowledge broker* dalam ekosistem perkoperasian yaitu berperan dalam menghubungkan, mendaur ulang, dan mendesiminasi berbagai pengetahuan dan khazanah perkoperasian antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat memberikan masukan yang relevan.

Paradigma perumusan agenda riset ini bersifat *demand-driven* agar riset menjadi sangat kontekstual dan relevan. Agar terjadi link and match antara apa-apa yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dengan kerja intelektual para peneliti. Dalam konteks itu kami telah meninjau berbagai demand driver factor yang relevan pada 5-10 tahun mendatang.

METODE PELAKSANAAN

Perumusan riset ini dimulai dari *Focus Group Discussion (FGD)* terbatas yang dilaksanakan pada 6 September 2024 dengan narasumber: Firdaus Putra, Audito Aji Anugrah dan Noer Sutrisno. FGD melakukan pemetaan isu-isu strategis perkoperasian serta meninjau bauran tema agenda riset negara lain (kajian literatur). Tahap selanjutnya kami lakukan sintesa untuk merumuskan bauran tema riset perkoperasian Indonesia. Melalui survei kami melakukan konfirmasi dengan meminta para pemangku kepentingan (akademisi/ peneliti, pemerintah, koperasi dan pelaku ekosistem lain) memberi pembobotan untuk melihat tema-tema yang dinilai prioritas dari perspektif masing-masing.

Survei kami laksanakan pada rentang 18 – 30 September 2024 dengan total responden yang kami dapatkan sebanyak 123 Responden. Adapun Responden tersebut secara acak yang diikuti oleh: 28 Akademisi/ peneliti, 23 Pemerintah (Kementrian/ Lembaga/ Dinas), 57 koperasi (Pengurus/ Pengawas/ Manajer), dan 14 Lembaga Profesi dan Penunjang). Posisi kami yang bekerja aktif dalam ekosistem dengan jaringan kerja yang cukup luas memungkinkan survei menjangkau responden yang lebih beragam. Sebagai suatu entitas bisnis, perkembangan koperasi di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal yang memaksa koperasi harus beradaptasi. Kami memindai beberapa tantangan strategis tersebut dengan kerangka PESTEL. Hasil pindaian kami menggunakan tren terkini dan kurun 5-10 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu-Isu Strategies

Politik

Kondisi terkini ditandai dengan suksesi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Pada pemerintahan sebelumnya, koperasi tidak memperoleh aksentuasi mendalam. Berbeda dengan itu, Prabowo memberi aksentuasi langsung dalam Asta Cita Ketiga, yakni “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”. Pandangan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat disimak pada bukunya, “Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”.

Yang menarik dalam suksesi pemerintahan tersebut adalah berteepatan dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Sehingga pemerintahan ke depan menandai suatu babak baru pembangunan Indonesia dengan membawa Visi Indonesia 2045. Arah kebijakan pembangunan koperasi juga mengalami pergeseran signifikan. Di mana pasca Orde Baru, Pemerintah tidak memiliki fokus kebijakan pembangunan berbasis sektor. Alhasil, usaha simpan pinjam koperasi dominan dari pada sektor riil.

Dalam RPJPN mendatang, kebijakan pembangunan koperasi difokuskan pada pengembangan sektor riil khususnya pertanian dan perikanan. Arah jangka panjang tersebut diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode I yang akan dimulai tahun 2025-2029 mendatang. Arah transformasi itu mengikuti *benchmark* global, di mana usaha sektor riil dominan, mencapai 53,2% volume usahanya (PBB, 2014). Sedangkan simpan pinjam (*credit union, saving & loan, coop bank*) hanya sebesar 5,6%. Kemudian jasa asuransi mencapai 46,8%. Berbanding terbalik dengan itu, volume usaha koperasi Indonesia didominasi oleh simpan pinjam, mencapai 62,27% dan sisanya adalah sektor riil dan tanpa adanya jasa asuransi (Kemenkop UKM, 2023).

Arah Transformasi Koperasi Indonesia



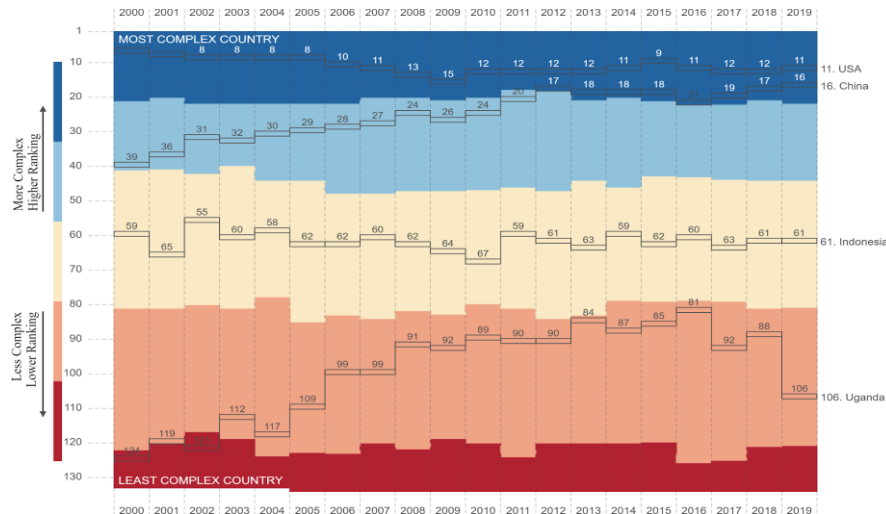
Sumber: Firdaus Putra dalam Bappenas, 2023

Ekonomi

Secara makro, ekonomi Indonesia dinilai mengkhawatirkan mengalami *Middle Income Trap* (MIT). Saat ini pendapatan per kapita mencapai US\$ 4.900 dengan target kenaikan sekurang-kurangnya US\$ 13.000 selama 20 tahun mendatang. Hal itu tercapai jika pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 7-8%.

MIT terjadi karena produktivitas ekonomi serta daya saing yang rendah. Baik dilihat dari produktivitas tenaga kerja atau produksi barang/ jasa. Tenaga kerja kita sebagian besar bekerja pada sektor dengan nilai tambah rendah, yakni pertanian 29,96% (BPS, 2022). Dalam kurun 10 tahun terakhir, Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah dari pada produk akhir. Hal itu ditunjukkan melalui *Complexity Index* Indonesia yang rendah, berada pada peringkat 65-55, selama 20 tahun terakhir.

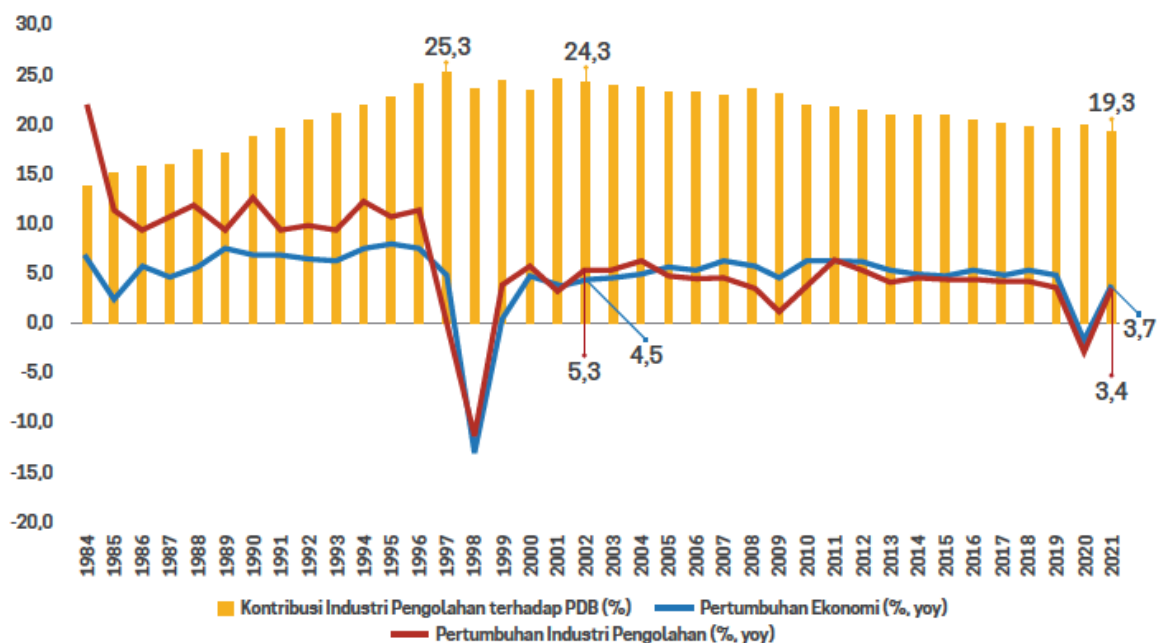
Peringkat Indonesia dalam *Complexity Index*



Sumber: Growth Lab Harvard, Juni 2021

Selain itu Indonesia deindustrialisasi prematur, ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan/ manufaktur terhadap PDB selama 20 tahun terakhir.

Laju Deindustrialisasi Indonesia



Sumber: Datanesia.id, Agustus 2022

Banyak pusat-pusat pengolahan atau pabrik tutup operasional atau bangkrut seperti di sektor tekstil, garmen, alas kaki dan sebagainya. Padahal sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Implikasinya, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) atau para pekerja informal meningkat. Dalam bertahan hidup mereka kemudian mendirikan berbagai usaha rumahan yang berorientasi subsisten. Atau mengadu nasib dengan menjadi mitra-mitra pekerja dari berbagai perusahaan startup seperti pada sektor transportasi dewasa ini.

Di sisi lain, industrialisasi dan hilirisasi dinilai menjadi syarat untuk Indonesia keluar dari MIT dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Industrialisasi bertujuan untuk meningkatkan volume produksi yang dioptimasi melalui teknologi atau mekanisasi. Sedangkan hilirisasi bertujuan untuk

meningkatkan nilai tambah suatu komoditas. Hilirisasi dilakukan pada sumber daya mineral atau non mineral seperti pertanian, perikanan dan pangan pada umumnya. Industrialisasi dan hilirisasi pada ujungnya akan meningkatkan produktivitas ekonomi serta serapan lapangan kerja.

Bank Dunia dalam laporannya *The Middle Income Trap (2024)* menyatakan ada tiga kunci agar Indonesia dapat keluar dari MIT. Formulanya mereka sebut sebagai *3I: investment, infuse technology dan innovation*. Kerangka tersebut juga relevan sebagai telaah pengembangan perkoperasian mendatang. Dengan memperhatikan tingkat pendanaan dan adopsi teknologi serta inovasi yang rendah selama ini.

Sosial

Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI) menyelenggarakan survei tentang Status SDM Koperasi di Indonesia pada tahun 2022 yang diikuti oleh 614 responden. Yang menemukan komposisi anggota koperasi secara demografis didominasi oleh Generasi X sebesar 46,04%, berikutnya Generasi Y sebanyak 37,87%. Generasi Baby Boomer cukup sedikit, yakni sebesar 9,63%. Sedangkan Generasi Z sangat sedikit, hanya 6,10% (ICCI, 2022).

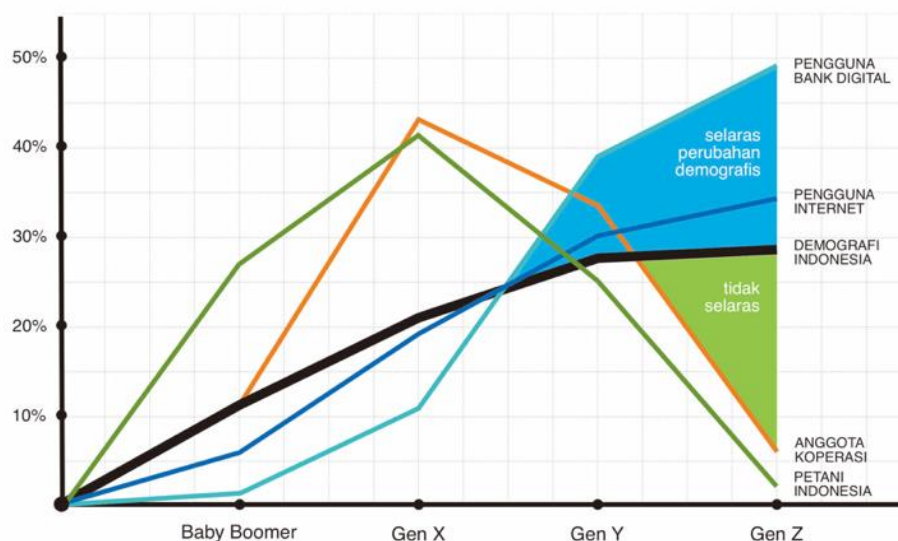
Sebaliknya, komposisi penduduk Indonesia berdasar demografi yang justru didominasi oleh generasi muda. Sensus Penduduk yang dilakukan BPS (2021) menemukan bahwa secara demografis penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh Generasi Z, sebesar 27,94%, Generasi Y 25,87% dan Generasi X 21,88%. Kemudian Generasi Baby Boomer hanya 11,56% dan Generasi Pasca Z sebanyak 10,88%. Tabel perbandingannya sebagai berikut:

Demografi	Baby Boomer	Generasi X	Generasi Y	Generasi Z
Rentang Lahir	1956-1960	1960-1980	1980-1995	1995-2010
Usia Per 2024	64-68	44-64	29-44	14-29
Indonesia	11,56%	21,88%	25,87%	27,94%
Koperasi	9,63%	46,04%	37,87%	6,10%

Sumber: Diolah Peneliti

Dari tabel di atas terlihat jelas bagaimana komposisi anggota koperasi tidak selaras dengan tren demografi penduduk Indonesia. Seharusnya komposisi generasi muda, yakni Generasi Y dan Z, dominan, yakni sebesar 53,81%. Sebaliknya, yang terjadi adalah dominasi dari Generasi X dan Baby Boomer yang bila dijumlahkan mencapai 55,67% pada anggota koperasi.

Tantangan Demografi Koperasi



Sumber: Firdaus Putra, 2024

Teknologi

Transformasi digital berjalan massif di seluruh sektor dan mengalami akselerasi ketika Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Teknologi memicu perubahan dan inovasi model bisnis. Pada gilirannya mendorong perubahan perilaku konsumen. Perusahaan-perusahaan startup digital menjadi denominator dalam perubahan tersebut. Indonesia memiliki 2.805 perusahaan startup (Startupranking, 2024) yang secara bersama-sama membangun ekosistem ekonomi digital.

Digitalisasi membawa kemudahan bagi masyarakat. Harga atau biaya teknologi menjadi makin murah. Dalam konteks koperasi telah melakukan transformasi digital selama 10 tahun terakhir. Baik diselenggarakan secara mandiri atau bermitra dengan perusahaan penyedia teknologi. Khususnya pada simpan pinjam, *mobile coop*, suatu aplikasi yang digunakan oleh anggota koperasi untuk bertransaksi dengan koperasi dan penyedia jasa lain, sudah berkembang massif. Biaya teknologi yang makin rendah mendorong adopsi tak hanya pada koperasi skala menengah-besar, namun juga mikro dan kecil.

Selain kemudahan, ada beberapa risiko yang muncul yang dihadapi koperasi dalam melaksanakan digitalisasi. Pertama risiko operasional, terkait dengan kesiapan SDM serta sarana pra sarana pendukung yang menjamin layanan tersebut terselenggara dengan baik. Kedua risiko legal, di mana beberapa fitur pada *mobile coop* selain fitur utama layanan simpan-pinjam, juga disediakan fitur dari penyedia lain yang di-embed dalam aplikasi tersebut. Hal ini memunculkan celah regulasi, apakah koperasi sebagai pengguna aplikasi harus mengantongi izin tertentu atau tidak.

Pada sisi lain teknologi digital berpotensi mendisrupsi khususnya pada koperasi simpan pinjam. Tingkat penetrasi internet di masyarakat mencapai 66,5% atau setara dengan 185 juta individu pengguna internet (Katadata, 2024). Hal itu memicu terjadinya perubahan perilaku konsumen yang dimoderasi dengan berbagai layanan yang disediakan secara digital. Data melaporkan transaksi melalui QRIS meningkat, pada Januari 2024 angkanya mencapai Rp. 5.335,33 triliun, tumbuh 17,19% tiap tahunnya (Bisnis.com, 2024).

Menurut LPS, sebanyak 80% investor pasar modal merupakan generasi milenial dan Z. Tercatat jumlah investor saat ini sebanyak 11,5 juta. Kemudian investor yang berusia yang berusia di bawah 30 tahun mencapai 57,26% dari total investor ritel (CNBCIndonesia.com, 2023). Menurut OJK, sekitar 80 persen atau 52 juta pelajar di Indonesia sudah memiliki rekening tabungan di bank, dengan total tabungan sekitar Rp. 29 triliun (MetroTV.com, 2023). Data menunjukkan pengguna layanan pinjol pada tahun 2023 sebelumnya berada di angka 2.704.003 jiwa. Angka itu naik signifikan menjadi 8.866.828 jiwa pada 2024 (CNNIndonesia, 2024).

Lingkungan

Bappenas mencatat total kerugian dan sisa makanan atau *food loss and waste* di dalam negeri pada 2000-2019 mencapai 48 juta ton per tahun. Volume tersebut setara dengan Rp. 213 triliun sampai Rp. 551 triliun per tahun. Lebih dari 60% sampah makanan itu didominasi sayur-mayur. Hal itu mengindikasikan adanya persoalan pada rantai pasok. Sangat menarik untuk mengeksplorasi berbagai peluang atau model kelembagaan koperasi memberi solusi terhadap masalah itu. Seperti misalnya model *Community-Supported Agriculture* berbasis koperasi multipihak. Atau model lain dalam konteks *sustainable production and consumption*.

Dampak perubahan iklim sangat dirasakan pada sektor pertanian. Diperkirakan kopi Indonesia akan terpengaruh, padi, kentang dan komoditas lain juga terpengaruh. Eksplorasi isu mitigasi perubahan iklim terhadap keamanan pangan dengan perspektif ekonomi kelembagaan relevan dilakukan. Bagaimana nilai dan norma dapat mengubah perilaku individu/ kelompok menjadi lebih bertanggungjawab.

Legal/ Regulasi

Pasca terbitnya UU PPSK No. 4 Tahun 2023 yang merevisi sebagian ketentuan pada UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, koperasi yang bekerja di sektor keuangan dibagi berdasar karakteristik layanan: *close loop* dan *open loop*. *Close loop* ditandai di mana koperasi melayani hanya kepada anggota dan koperasi lain saja dengan bentuk Usaha Simpan Pinjam diawasi oleh Kemenkop UKM. *Open loop* adalah ketika koperasi melayani anggota dan selain anggota dalam bentuk usaha perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal dan usaha di sektor jasa lainnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perbandingan *close* dan *open loop* selengkapnya sebagai berikut:

Aspek	<i>Close Loop</i>	<i>Open Loop</i>
Penghimpunan	Dari anggota atau koperasi lain	Dari anggota atau non anggota
Penyaluran	Kepada anggota atau koperasi lain	Kepada anggota dan non anggota
Pendanaan	Maksimal 40%	Dapat lebih dari 50%
Usaha	Usaha Simpan Pinjam	Perbankan, usaha asuransi, usaha dana pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, usaha modal ventura dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan
Bentuk	Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Sektor Riil yang memiliki Unit Simpan Pinjam	Koperasi BPR, Koperasi LKM, Koperasi <i>Securities Crowd Funding</i> dan sebagainya
Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan	Kementerian Koperasi	Otoritas Jasa Keuangan

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Ketentuan tersebut membuka peluang baru bagi koperasi di Indonesia secara legal berusaha di sektor jasa keuangan lainnya. Meski demikian regulasi turunan mengatur dengan standar yang sama tanpa membedakan badan hukum penyelenggara, koperasi atau PT. Sangat menarik untuk melihat di masa depan apakah koperasi di sektor jasa keuangan dapat tumbuh atau tidak dengan adanya peluang tersebut.

Salah satu implikasi UU tersebut adalah adanya revisi regulasi terkait usaha simpan pinjam. Pemerintah menerbitkan Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi untuk memperkuat pengaturan sektor tersebut. Meski banyak pengayaan dan penguatan ketentuan, salah satu yang paling disoroti masyarakat adalah terkait dengan ketentuan modal awal yang harus disetor. Besarannya dari Rp. 15 juta menjadi Rp. 500 juta. Peningkatan modal awal bertujuan untuk meningkatkan skala usaha serta profesionalisme pengelolaan simpan pinjam.

UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 telah mengubah sebagian ketentuan pada UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, salah satunya terkait dengan ketentuan pendirian dari 20 orang menjadi 9 orang. Tujuannya memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mendirikan koperasi. Pada sisi lain isu skala usaha dapat menjadi perhatian, apakah koperasi yang tumbuh cenderung berskala mikro atau dapat membesar seiring berjalannya waktu.

Salah satu turunan UU tersebut adalah PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM. PP telah memberi banyak kewenangan bagi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam pengembangan koperasi. Seperti alokasi 40% pengadaan barang jasa Pemerintah (termasuk BUMN dan Pemda) bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil. Sangat menarik untuk melihat bagaimana efektivitas PP tersebut di era otonomi daerah.

UU RPJPN 2025-2045 No. 59 Tahun 2024 memberi mandat kepada Pemerintah untuk meningkatkan rasio volume usaha koperasi terhadap PDB dari 1,1% (2025) menjadi 5% (2045). Dengan arah pembangunan yang fokus pada sektor riil, agromaritim dengan pendekatan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam. Menarik untuk melihat bagaimana strategi dan kebijakan Pemerintah dalam mencapai target besar tersebut. Termasuk melihat rasio per daerah dengan membandingkan total volume per provinsi dengan PDRB masing-masing. Serta bagaimana dampaknya terhadap koperasi dan kesejahteraan anggota. Indeks Promosi Ekonomi Anggota (IPEA) dapat menggenapi indikator makro di atas untuk melihat kinerja koperasi bagi anggotanya.

Regulasi lain yang membawa perubahan mendasar adalah Permenkop No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Multipihak (KMP). Dengan adanya regulasi itu, saat ini masyarakat bisa mengadopsi KMP sebagaimana yang berkembang di negara lain sejak tahun 1990-an. Per Desember 2024 sudah ada 264 KMP yang resmi berdiri di berbagai kota/ kabupaten. Menarik untuk melihat bagaimana tingkat difusi dan adopsi regulasi tersebut serta bagaimana masyarakat mengimplementasikannya. Pada sisi

lain, belum tersedia *role model* di dalam negeri yang menantang masyarakat untuk mencari bentuk dan pola yang tepat.

Sejak tahun 2022 Pemerintah telah berupaya melakukan revisi UU Perkoperasian yang mana drafnya telah diserahkan kepada DPR per September 2023. Banyak perubahan dilakukan pada ketentuan keanggotaan, organisasi, permodalan, usaha, ekosistem dan lainnya. Sangat menarik untuk melihat dampak bagaimana perubahan regulasi tersebut akan mempengaruhi kinerja koperasi di masa depan. Pemerintah mengklaim bahwa muatan pada RUU tersebut berupaya untuk melakukan modernisasi, meningkatkan perlindungan terhadap koperasi dan anggota, serta meningkatkan peran koperasi di seluruh sektor usaha.

Perkembangan Penelitian Perkoperasian di Beberapa Negara

Dibeberapa negara lainnya telah mengembangkan beberapa isu yang dapat dijadikan untuk bahan kajian riset lebih lanjut. Terdapat beberapa perkembangan issue perkoperasian di dunia antara lain sebagai berikut. Pada paper yang disajikan oleh Hashim & Fawzi (2015) dengan judul *Issues, Scope, and Focus on Research Cooperatives in Malaysia* terdapat beberapa issue rekomendasi penelitian terkait dengan koperasi di Malaysia tercakup dalam tiga aspek yaitu terkait dengan *Performance Cooperatives, Management Style, Human Resource Practices*. Berdasarkan rekomendasi tersebut Analisis Level kajian dapat dilakukan dengan melakukan kajian analisis level dimulai dari tingkat individual, grup, organisasi, industri, dan masyarakat.

Pada Paper yang ditulis oleh Vuotto (2017) dengan judul *Content and Scope of Research on Cooperatives: The Performance of Latin America Network of Researchers on Cooperatives* memberikan gambaran untuk melakukan kajian analisis dan daya uji capaian terkait dengan dinamika organisasi (*dynamics organizations*) pada koperasi dan capaiannya.

Demand Driver Factors

Dinamika Sektor Usaha Koperasi

Berdasarkan Data Keragaan Koperasi (Kemenkop UKM, 2022), per 31 Desember 2022, terdapat 130.354 koperasi aktif di Indonesia. Sementara total jumlah anggota mencapai 29.448.965 orang. Berdasar lapangan usaha, koperasi-koperasi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

No.	Business Sector	Amount	Volume
1.	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	0,03%	0,03%
2.	Industri Pengolahan	1,16%	2,04%
3.	Informasi dan Komunikasi	0,64%	0,18%
4.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,04%	0,05%
5.	Jasa Keuangan dan Asuransi	41,62%	66,04%
6.	Jasa Lainnya	31,32%	3,76%
7.	Jasa Pendidikan	0,07%	0,02%
8.	Jasa Perusahaan	0,44%	1,15%
9.	Konstruksi	0,17%	0,32%
10.	Pengadaan Air, Peng. Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,09%	0,07%
11.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12%	0,10%
12.	Penyediaan Akomodasi dan Makanan-Minuman	7,44%	1,78%
13.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil/Motor	5,57%	17,43%
14.	Pertambangan dan Penggalian	0,29%	0,14%

15.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10,11%	6,27%
16.	Real Estat	0,05%	0,05%
17.	Transportasi dan Pergudangan	0,85%	0,58%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Dari ke-17 lapangan usaha di atas, 5 terbanyak adalah: 1). Jasa keuangan dan asuransi mendominasi dengan 41,62%; 2). Jasa lainnya sebanyak 31,32%; 3). Pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan 10,11%; 4). Penyediaan akomodasi makan minum dengan 7,44%; dan 5). Perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan motor) dengan 5,57%. Sedangkan berdasarkan volume usahanya, maka 5 lapangan usaha dengan volume usaha terbesar adalah: 1). Jasa keuangan dan asuransi; 2). Perdagangan besar; 3). Pertanian, kehutanan dan perikanan; 4). Jasa lainnya; dan 5). Industri pengolahan.

Dari sisi modal, total modal koperasi (modal sendiri dan modal luar) mencapai Rp. 245,61 triliun. Sementara total volume usahanya adalah sebesar Rp. 197,87 triliun. Sehingga rasio antara modal dengan volume usaha sebesar 1:1,2. Artinya dari Rp.1 modal, hanya menghasilkan Rp. 1,2. Rasio tersebut menunjukkan koperasi tidak maksimal dalam memanfaatkan modal yang dimiliki untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena dominasi usaha simpan pinjam yang menghasilkan nilai tambah tidak setinggi sektor riil.

Berdasarkan Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, koperasi dapat digolongkan berdasar: jumlah anggota, modal sendiri dan aset, yang kemudian disebut sebagai Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK), sebagai berikut:

Ketentuan	KUK 1	KUK 2	KUK 3	KUK 4
Anggota	≤ 5.000	5.001 - 9.000	9.001 - 35.000	> 35.000
Modal Sendiri	≤ 250 jt	> 250jt - 15M	> 15M - 40M	> 40M
Aset	≤ 2,5M	> 2,5M - 100M	> 100M - 500M	> 500M

Sumber: Kemenkop UKM, 2020

Dari data yang ada, koperasi KUK 1 atau skala mikro, mencapai 82% persen. Disusul berikutnya adalah KUK 2 sebanyak 17%, KUK 3 sebanyak 0,58% dan sebanyak 0,22% adalah KUK 4. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar koperasi di Indonesia berskala mikro. Yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja usaha mereka karena mengalami keterbatasan dalam sumberdaya, rantai pasok, jangkauan dan posisi tawar di pasar.

Persebaran Wilayah

Secara spasial dapat diidentifikasi 10 provinsi dengan produktivitas usaha koperasi yang dominan, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Banten, Sumatera Utara, NTT dan DI Yogyakarta. Total volume usaha koperasi di 10 provinsi tersebut berkontribusi terhadap 76% dari seluruh volume usaha koperasi di Indonesia yang terdiri atas 34 provinsi (data pra pemekaran Papua). Artinya keberadaan koperasi-koperasi pada provinsi tersebut sangat signifikan sebagai suatu entitas usaha.

No.	Provinsi	Koperasi	Anggota	Aset (Juta)	Volume (Juta)
1.	Jawa Timur	22.979	4.366.582	43.881.783,69	34.257.742,38
2.	Jawa Tengah	10.081	8.525.139	50.718.693,37	32.745.324,65
3.	Jawa Barat	16.310	2.533.624	27.468.177,83	23.771.515,76
4.	DKI Jakarta	4.963	1.854.880	36.441.461,37	22.046.606,21
5.	Bali	4.299	1.104.991	21.479.356,14	17.686.528,51
6.	Kalbar	3.317	1.434.316	17.492.660,95	10.823.313,25

7.	Banten	4.448	993.061	6.660.394,60	10.274.969,02
8.	Sumatera Utara	5.311	1.837.650	10.121.181,01	6.525.565,96
9.	NTT	2.801	1.819.107	8.864.009,47	4.620.016,47
10.	Yogyakarta	1.894	875.820	5.638.353,60	4.517.744,61

Sumber: Kemenkop UKM, 2022

Jawa Timur memiliki praktik perkoperasian yang baik dari sisi keanggotaan dan usaha. Koperasi-koperasi peternakan dengan komoditas susu cukup massif. Kemudian koperasi pondok pesantren yang menyelenggarakan multi usaha seperti sektor konsumsi dan simpan pinjam. Ditambah koperasi-koperasi wanita dengan karakteristik tanggung renteng menjadi salah satu penanda geliat perkoperasian di wilayah tersebut.

Di Jawa Tengah penggerak utamanya didominasi oleh sektor usaha simpan pinjam seperti keberadaan salah satu koperasi besar di Indonesia. Sektor komoditas juga berkontribusi signifikan pada produk agribisnis seperti pengolahan gula jawa yang berorientasi ekspor yang ditemukan di beberapa kabupaten. Penopang lainnya adalah koperasi di area pesisir yang sebagian dikelola dengan cukup bagus.

Provinsi Jawa Barat ditandai dengan koperasi sektor pertanian, peternakan dan kehutanan dengan corak koperasi produksi dan pengolahan khususnya susu serta komoditas orientasi ekspor lain seperti kopi. Koperasi pertanian pada umumnya berkembang didukung dengan geografis/ lahan yang bagus. Simpan pinjam juga massif, merupakan sektor utama kedua setelah pertanian.

DKI Jakarta didominasi oleh koperasi simpan pinjam dan sektor jasa. Beberapa koperasi skala besar dan nasional berada di sana. Sektor konsumsi dan koperasi-koperasi fungsional juga dominan. Bali didominasi koperasi simpan pinjam yang melayani anggota UMKM sektor pariwisata. Baru pasca pandemi ada geliat baru di mana koperasi diarahkan ke sektor agribisnis.

Kalimantan Barat memiliki kekhasan di mana model *credit union* berkembang massif. Banyak *credit union* yang beranggotakan di atas 100 ribuan anggota. *Credit union* di Kalimantan Barat terbukti meningkatkan akses masyarakat terhadap keuangan sekaligus meningkatkan antusiasme terhadap koperasi. Kepercayaan masyarakat terhadap koperasinya dan menjadikan koperasi sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat dan anggotanya.

Sedangkan Banten tidak berbeda jauh, didominasi koperasi simpan pinjam. Sumatera Utara cukup kuat koperasi sektor produksi seperti sawit dan perkebunan lainnya. Juga koperasi simpan pinjam yang didominasi model *credit union*. Hal yang sama ditemukan di NTT, di mana model *credit union* sangat massif berkembang. Yogyakarta ditandai dengan menggeliatnya usaha simpan pinjam yang melayani anggota UMKM.

Tiga besar wilayah dengan persentase pertumbuhan koperasi relatif tinggi didominasi wilayah pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jumlah koperasi memiliki relasi kuat dengan jumlah penduduk, mengonfirmasi bahwa salah satu kekuatan koperasi adalah kesertaan penduduk dalam berkoperasi. Makin besar jumlah anggota koperasi, volume usahanya cenderung tinggi. Hal tersebut terjadi karena koperasi pertama-tama hadir untuk melayani kebutuhan anggotanya. Anggota sebagai *niche market* khususnya pada usaha simpan pinjam.

Perkembangan keanggotaan koperasi yang dinamis terjadi di daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang besar dan kegiatan ekonomi yang dinamis, sehingga Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali menjadi penyumbang terbesar. Di provinsi Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua, keanggotaannya relatif kecil. Fenomena di atas menunjukkan bahwa koperasi mudah berkembang di daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang besar dan ekonomi yang maju. Hal ini wajar mengingat koperasi yang berkembang di masyarakat adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen yang juga memiliki usaha simpan pinjam.

Pada tiga provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan produktivitas usaha koperasi yang tinggi dapat diidentifikasi beberapa hal. Dari segi jumlah anggota, Jawa Timur lebih kecil daripada Jawa Tengah, namun memiliki jumlah koperasi terbanyak di Indonesia, yakni dua kalinya Jawa Tengah. Hal ini seturut dengan kebijakan Pemerintah Provinsi yang mengembangkan koperasi wanita berbasis kelompok-kelompok kecil beranggotakan 20-40 orang.

Dari statistik di atas, provinsi Jawa Tengah dapat dinilai ideal, di mana jumlah koperasi relatif sedikit (dibanding Jawa Timur dan Jawa Barat), namun memiliki jumlah anggota terbesar di Indonesia,

yakni sebanyak 8,5 juta orang. Rasionya 1:850 dari pada Jawa Timur, rasionya 1:195 dan Jawa Barat, rasionya 1:156. Rasio Jawa Tengah juga lebih baik dari pada Kalimantan Barat 1:420 dan NTT 1:642 yang keduanya digadang-gadang sebagai provinsi koperasi di Indonesia. Rasio jumlah anggota terhadap koperasi di provinsi Jawa Tengah di atas rata-rata nasional, 1:230. Hal tersebut merupakan indikasi bagus di mana jumlah anggota besar dengan jumlah koperasi yang lebih sedikit. Proses konsolidasi usaha melalui koperasi terjadi secara efektif.

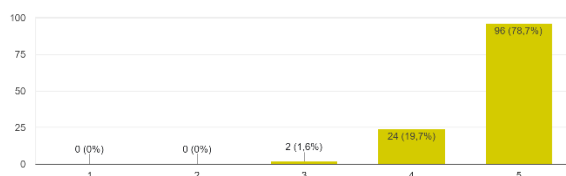
Dilihat dari sisi aset koperasi di Jawa Tengah memiliki rata-rata aset sebesar 5 milyar rupiah, tidak berbeda jauh dengan Kalimantan Barat, 5,3 milyar rupiah/ koperasi. Sedangkan Jawa Timur 1,9 milyar rupiah dan Jawa Barat 1,6 milyar rupiah. Sedangkan yang tertinggi adalah DKI Jakarta dengan rata-rata 7,3 milyar rupiah per koperasi. Sedangkan dari segi produktivitas aset, secara umum relatif sama kondisinya, jumlah aset lebih besar daripada total volume usaha yang dihasilkan. Hanya koperasi di Banten yang berbeda di mana asetnya memiliki produktivitas cukup tinggi.

Perspektif Pemangku Kepentingan

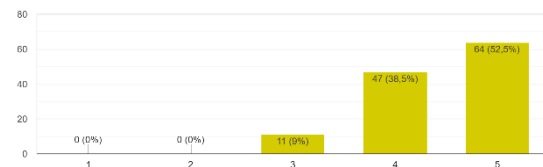
Dalam kajian survei, kami memberikan 12 item pernyataan mengenai topik yang diisi oleh responden. Pada hasil survei ini kami melakukan pembobotan dengan menggunakan skala likert (5) dengan skala (1) yaitu Sangat Tidak Penting sampai dengan skala (5) Sangat Penting. Pada item pernyataan pertama Topik mengenai Perubahan Dinamis dan Model Bisnis: Adaptasi bisnis terhadap perubahan, lingkungan, teknologi dan pasar menyatakan sebanyak 96 Responden mengatakan Topik tersebut sangat penting disusul oleh 24 Responden memilih Penting dan 2 Responden Netral. Berdasarkan item pernyataan pertama ini dapat disimpulkan bahwa para Responden menyatakan opini sangat penting dalam aspek perkoperasian pada topik perubahan Dinamis dan Model Bisnis.

Hal serupa diikuti oleh pernyataan kedua terkait dengan Dinamika Organisasi dan Siklus Hidup: Perkembangan organisasi dari pembentukan, pertumbuhan, stabilitas, krisis dan pembubaran bahwa sebanyak 64 responden menyatakan opini sangat penting serta 47 responden memilih penting dan 11 orang Netral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Topik tersebut sangat penting untuk diteliti

1. Perubahan Dinamis dan Model Bisnis: Adaptasi bisnis terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan pasar.
122 jawaban



2. Dinamika Organisasi dan Siklus Hidup: Perkembangan organisasi dari pembentukan, pertumbuhan, stabilitas, krisis dan pembubaran.
122 jawaban

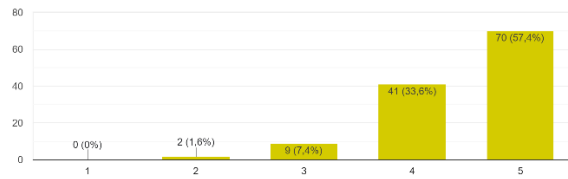


Sumber: Diolah Peneliti, 2024

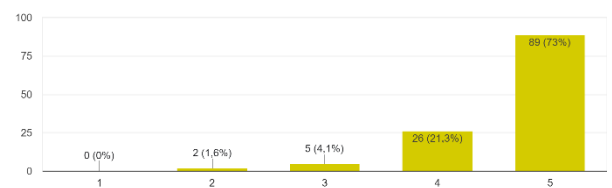
Pernyataan ketiga terkait dengan Kinerja Keuangan dan Perpajakan : Analisis pendapatan, biaya, dan kewajiban pajak untuk menilai Kesehatan finansial. Dari 122 responden menunjukkan bahwa sebanyak 70 Responden menyatakan sangat penting, 41 Responden menyatakan penting, 9 Responden menyatakan netral dan 2 orang menyatakan tidak penting. Hasil tersebut menunjukkan bahwa topik terkait dengan Kinerja Keuangan menjadi topik penting untuk dilakukan politik

Pernyataan keempat terkait dengan Tata kelola Koperasi: Struktur, Sistem dan Proses yang mengarahkan dan mengendalikan Koperasi. Pada pernyataan keempat ini menunjukkan bahwa sebanyak 89 Responden menyatakan Sangat Penting, 26 Responden menyatakan penting, 5 Responden Netral dan 2 Responden Tidak Setuju. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan keempat menunjukkan topik perkoperasian terkait dengan Tata kelola ini menjadi topik penting untuk dilakukan penelitian

3. Kinerja Keuangan dan Perpajakan: Analisis pendapatan, biaya, dan kewajiban pajak untuk menilai kesehatan finansial.
122 jawaban



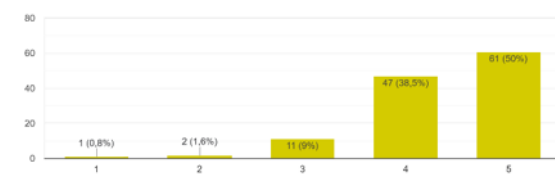
4. Tata Kelola Koperasi: Struktur, sistem, dan proses yang mengarahkan dan mengendalikan koperasi.
122 jawaban



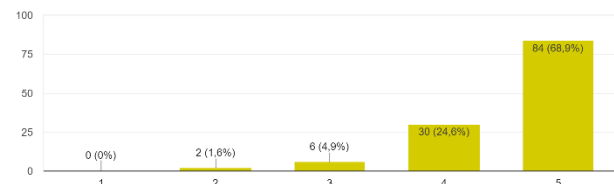
Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Pada Pernyataan kelima terkait dengan Kepatuhan Regulasi: Tingkat kesesuaian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku sebanyak 61 Responden Sangat penting, 47 Responden memberikan opini sebanyak 47 Responden, 11 Responden Netral, 2 Responden menyatakan tidak penting dan 1 responden menyatakan sangat tidak penting. Pernyataan keenam terkait dengan Budaya Anggota: Nilai, Norma, Komitmen dan Perilaku yang dianut dan dipraktikkan oleh Anggota menunjukkan bahwa sebanyak 84 responden menyatakan opini sangat penting, sebanyak 30 responden menyatakan penting, dan diikuti oleh 6 Responden menyatakan netral dan 2 responden menganggap tidak penting. Dapat disimpulkan untuk pernyataan keenam sangat penting terkait topik untuk diteliti lebih lanjut.

5. Kepatuhan Regulasi: Tingkat kesesuaian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku.
122 jawaban



6. Budaya Anggota: Nilai, norma, komitmen dan perilaku yang dianut dan dipraktikkan oleh anggota.
122 jawaban

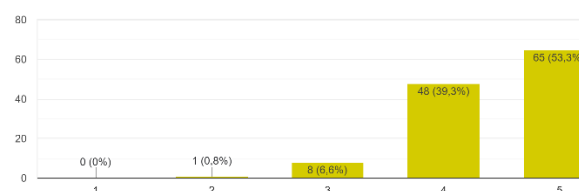


Sumber: Diolah Peneliti, 2024

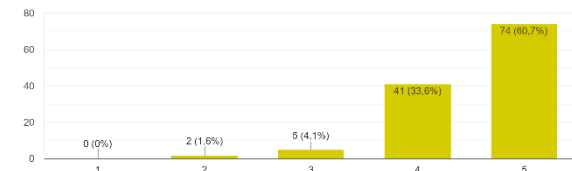
Pada Pernyataan ke tujuh terkait dengan topik Perubahan Ekonomi, Sosial dan Budaya : Transformasi dalam norma sosial, kebiasaan dan nilai Masyarakat yang mempengaruhi bisnis. Pada Topik ini menunjukkan bahwa sebanyak 65 Responden Sangat penting, 48 Responden Penting, dan 48 Responden Netral serta 1 Responden menyatakan Tidak Penting.

Pada Pernyataan kedelapan terkait dengan Pemasaran dan Rantai Pasok : Strategi distribusi produk dan jasa dari produsen hingga konsumen akhir, Pada topik ini menunjukkan bahwa sebanyak 74 menyatakan opini sangat penting, disusul oleh 41 orang menjawab penting, dan 5 orang menyatakan netral dan 2 responden menyatakan tidak penting. Sehingga dapat disimpulkan dari pernyataan kedelapan bahwa topik ini sangat penting untuk diteliti melalui riset lebih lanjut

7. Perubahan Ekonomi, Sosial dan Budaya: Transformasi dalam norma sosial, kebiasaan, dan nilai masyarakat yang mempengaruhi bisnis.
122 jawaban



8. Pemasaran dan Rantai Pasok: Strategi distribusi produk dan jasa dari produsen hingga konsumen akhir.
122 jawaban



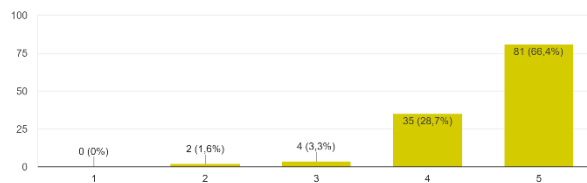
Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Pada pernyataan kesebelas terkait dengan kepemimpinan, kewirausahaan dan Model Manajemen: Pendekatan kepemimpinan, kewirausahaan dan pengelolaan organisasi untuk mencapai

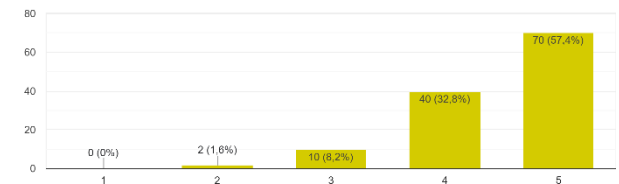
tujuan sebanyak 81 responden menyatakan opini sangat penting, 35 responden juga menyatakan opini penting dan sebanyak 4 Responden Netral serta 2 Responden memberikan opini tidak penting.

Pada pernyataan keduabelas topik terkait dengan kebijakan publik dan regulasi: kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi operasi bisnis dan industri. Pada topik ini menunjukkan bahwa sebanyak 70 responden memberikan opini sangat penting, 40 Responden menyatakan penting, dan 10 Responden memilih netral serta 2 orang memilih tidak penting

9. Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Model Manajemen: Pendekatan kepemimpinan, kewirausahaan dan pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan.
122 jawaban



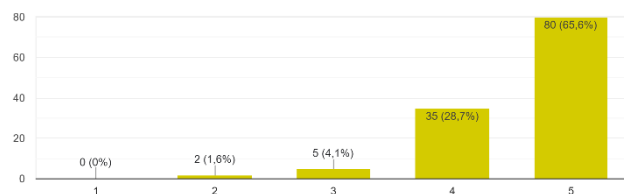
10. Kebijakan Publik dan Regulasi: Kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi operasi bisnis dan industri.
122 jawaban



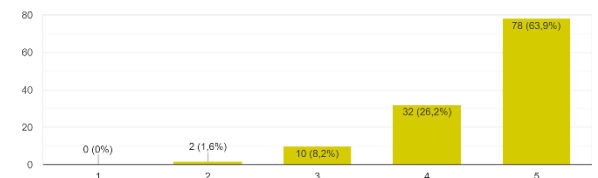
Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Pada pernyataan kesebelas topik terkait dengan Produk dan Jasa: Pengembangan, Inovasi dan Penawaran Produk serta jasa yang sesuai dengan kebutuhan anggota atau pasar. Pada topik ini menunjukkan bahwa sebanyak 80 responden memberikan opini sangat penting, 35 Responden menyatakan penting, dan 5 Responden memilih netral serta 2 orang memilih tidak penting Pada pernyataan keduabelas topik terkait dengan Efisiensi, Efektivitas Daya Saing Bisnis: Upaya meningkatkan output dengan sumberdaya minimal dan menghasilkan kinerja unggul di pasar. Pada topik ini menunjukkan bahwa sebanyak 78 responden memberikan opini sangat penting, 32 Responden menyatakan penting, dan 10 Responden memilih netral serta 2 orang memilih tidak penting

11. Produk dan Jasa: Pengembangan, inovasi, dan penawaran produk serta jasa yang sesuai dengan kebutuhan anggota atau pasar.
122 jawaban



12. Efisiensi, Efektivitas Daya Saing Bisnis: Upaya meningkatkan output dengan sumber daya minimal dan menghasilkan kinerja unggul di pasar.
122 jawaban



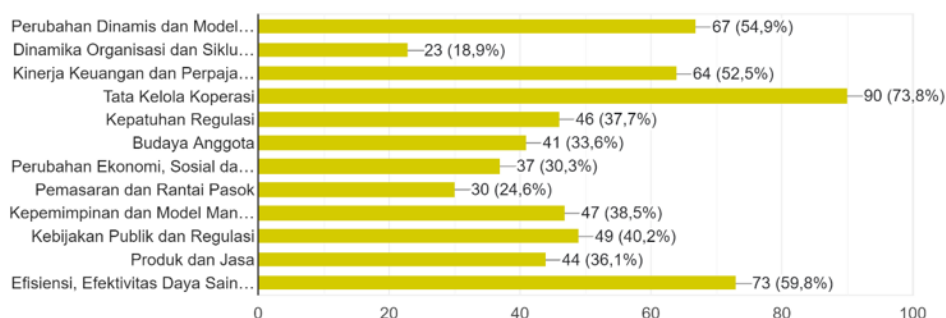
ib:

il. Pada Sektor keuangan terdapat 5 prioritas

topik yang diangkat dan yang pertama paling banyak menunjukkan urisi Tata Kelola Koperasi dengan 90 Responden, disusul kedua dengan Efisiensi, Efektivitas Daya Saing Bisnis dengan 73 Responden, Perubahan Dinamis dan Model Bisnis dengan 67 Responden, Kinerja Keuangan dan Perpajakan 64 Responden serta Kebijakan Publik dan Regulasi sebanyak 49 Responden.

Topik Prioritas untuk Sektor Keuangan

122 jawaban

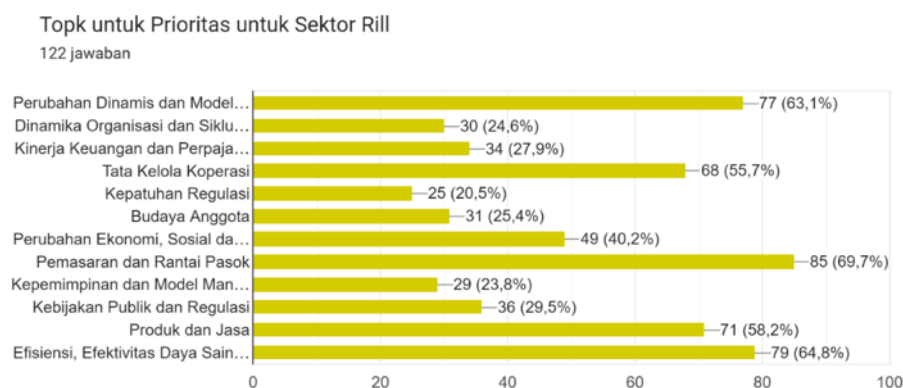


Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Diagram ini menunjukkan prioritas topik penelitian untuk sektor keuangan berdasarkan 122 jawaban. Tata Kelola Koperasi (73,8%) menjadi topik dengan prioritas tertinggi, menandakan bahwa aspek pengelolaan koperasi masih menjadi fokus utama dalam sektor keuangan. Disusul oleh Efisiensi, Efektivitas, dan Daya Saing Bisnis (59,8%), serta Perubahan Dinamis dan Model Bisnis (54,9%), yang mencerminkan pentingnya optimalisasi kinerja bisnis dan adaptasi model usaha untuk meningkatkan daya saing. Kinerja Keuangan dan Perpajakan (52,5%) juga mendapat perhatian besar, menunjukkan bahwa aspek keuangan dan perpajakan masih menjadi elemen penting dalam sektor ini.

Topik dengan prioritas menengah meliputi Kebijakan Publik dan Regulasi (40,2%), Kepemimpinan dan Model Manajemen (38,5%), serta Kepatuhan Regulasi (37,7%), yang menegaskan bahwa peran kebijakan, regulasi, dan kepemimpinan tetap diperhitungkan meskipun tidak menjadi prioritas utama. Budaya Anggota (33,6%) dan Perubahan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (30,3%) juga menunjukkan relevansi, tetapi kurang dipilih dibandingkan aspek tata kelola dan efisiensi bisnis. Sementara itu, Pemasaran dan Rantai Pasok (24,6%) serta Dinamika Organisasi dan Siklus Hidup (18,9%) menjadi topik dengan tingkat perhatian terendah, yang menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi dan strategi pemasaran bukanlah fokus utama dalam penelitian sektor keuangan.

Secara keseluruhan, penelitian di sektor keuangan lebih banyak berfokus pada pengelolaan koperasi, efisiensi bisnis, dan kebijakan keuangan, dibandingkan dengan aspek pemasaran atau dinamika organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan manajemen keuangan dan tata kelola koperasi dianggap lebih krusial dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing sektor keuangan.



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Diagram batang ini menunjukkan hasil survei mengenai topik penelitian yang diprioritaskan untuk sektor riil, berdasarkan 122 jawaban responden. Dari hasil yang ditampilkan, Perubahan Ekonomi, Sosial, dan Budaya menjadi topik dengan prioritas tertinggi, dipilih oleh 85 responden (69,7%). Hal ini menunjukkan bahwa dinamika perubahan makro dalam sektor riil sangat diperhatikan dalam penelitian. Selain itu, Efisiensi, Efektivitas, dan Daya Saing Bisnis juga menjadi salah satu fokus utama dengan 79 suara (64,8%), mencerminkan pentingnya strategi peningkatan kinerja usaha dalam menghadapi persaingan. Perubahan Dinamis dan Model Bisnis juga memiliki tingkat kepentingan tinggi, dipilih oleh 77 responden (63,1%), yang menandakan bahwa adaptasi terhadap perkembangan bisnis merupakan aspek penting dalam penelitian sektor riil. Sementara itu, Produk dan Jasa juga menempati posisi penting dengan 71 suara (58,2%), menegaskan bahwa inovasi dalam produk dan jasa menjadi perhatian utama dalam pengembangan sektor ini.

Pada kategori prioritas menengah, Tata Kelola Koperasi dipilih oleh 68 responden (55,7%), menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi masih menjadi tantangan yang perlu diteliti lebih lanjut. Pemasaran dan Rantai Pasok mendapatkan 49 suara (40,2%), yang mengindikasikan pentingnya strategi distribusi dalam meningkatkan daya saing bisnis. Selain itu, Kebijakan Publik dan Regulasi menarik perhatian 36 responden (29,5%), yang menunjukkan bahwa meskipun regulasi penting, aspek ini tidak menjadi fokus utama dibandingkan dengan faktor bisnis dan ekonomi.

Di sisi lain, beberapa topik memiliki tingkat prioritas yang lebih rendah. Kinerja Keuangan dan Perpajakan hanya dipilih oleh 34 responden (27,9%), menandakan bahwa meskipun keuangan dan perpajakan penting, namun tidak menjadi perhatian utama dalam penelitian sektor riil. Dinamika Organisasi dan Siklus Hidup juga hanya dipilih oleh 30 responden (24,6%), yang menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi kurang dianggap sebagai isu mendesak. Kepemimpinan dan Model Manajemen menarik 29 suara (23,8%), yang mengindikasikan bahwa meskipun kepemimpinan berperan penting dalam keberlanjutan bisnis, aspek ini masih kalah dibandingkan dengan faktor efisiensi dan inovasi. Sementara itu, Budaya Anggota (31 suara, 25,4%) dan Kepatuhan Regulasi (25 suara, 20,5%) menjadi dua topik dengan tingkat prioritas terendah, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan budaya organisasi kurang mendapat perhatian dalam pengembangan sektor riil.

Secara keseluruhan, hasil survei ini mengindikasikan bahwa penelitian di sektor riil lebih berfokus pada perubahan ekonomi, daya saing bisnis, dan inovasi produk, dibandingkan dengan aspek regulasi, kepemimpinan, atau dinamika organisasi. Temuan ini mencerminkan bahwa pemangku kepentingan dalam sektor riil lebih tertarik pada faktor-faktor yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan bisnis dan efisiensi operasional, dibandingkan dengan faktor administratif atau kelembagaan.

Bauran Isu	Tema Riset	Mikro							Meso		Makro		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1. Peran Koperasi dalam Ekonomi Nasional													X
2. Produktivitas dan Daya Saing			X	X	X	X		X	X				X
3. Industrialisasi dan Hilirisasi				X				X	X				X
4. Sektor Riil dan Agromaritim		X	X			X		X	X			X	X
5. Inovasi Model Bisnis dan Teknologi				X		X		X	X			X	
6. Entrepreneurship		X	X	X		X		X	X	X			
7. Koperasi Keuangan			X	X	X	X	X				X		X
8. Inklusi Keuangan						X		X	X			X	
9. Perubahan Demografi		X				X						X	
10. Lapangan Kerja						X		X	X			X	
11. Perubahan Perilaku Konsumen		X		X		X		X	X			X	
12. Regulasi Terkini			X	X	X	X				X	X		X
13. Kepatuhan terhadap Regulasi							X			X	X		
14. Tata Kelola yang Baik			X	X	X		X	X	X	X	X		
15. Komitmen Anggota;		X	X	X		X		X	X	X		X	
16. Permodalan;		X		X	X			X	X				
17. Perpajakan;					X	X					X		X
18. Kompetensi SDM;			X	X		X	X	X	X	X	X		
19. Kesehatan Koperasi;			X	X	X	X	X			X	X		
20. Pengawasan Usaha;				X	X	X	X			X	X		X
21. Promosi Ekonomi Anggota;			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
22. Skala Usaha		X		X	X		X	X	X	X	X		
Keterangan: A. Budaya Anggota; B. Kepemimpinan dan Model Manajemen; C. Efisiensi, Efektivitas Daya Saing Bisnis; D. Kinerja Keuangan dan Perpajakan; E. Produk dan Jasa; F. Tata Kelola Koperasi; G. Pemasaran dan Rantai Pasok; H. Perubahan Dinamis dan Model Bisnis; I. Dinamika Organisasi dan Siklus Hidup; J. Regulasi dan Kepatuhan; K. Perubahan Sosial dan Budaya; dan L. Kebijakan Publik dan Regulasi													

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Tabel diatas menghubungkan berbagai bauran isu terkait koperasi dan ekonomi dengan topik penelitian relevan yang dikategorikan ke dalam tiga tingkat analisis, yaitu mikro, meso, dan makro. Kolom pertama memuat 22 isu strategis yang mencakup berbagai aspek koperasi dan ekonomi, seperti regulasi, daya saing, model bisnis, sumber daya manusia (SDM), dan promosi ekonomi anggota. Sementara itu, kolom kedua mengelompokkan topik penelitian ke dalam tiga kategori utama. Kategori mikro berfokus pada aspek internal koperasi, seperti budaya anggota, efisiensi bisnis, kepemimpinan,

produk, serta tata kelola koperasi. Kategori meso lebih menyoroti perubahan dinamis dan siklus organisasi koperasi di tingkat menengah. Sedangkan kategori makro mencakup regulasi, kebijakan publik, serta dampak sosial koperasi dalam skala yang lebih luas.

Setiap topik penelitian dalam tabel ini memiliki keterkaitan dengan beberapa isu dalam bauran isu, yang menunjukkan adanya hubungan multidimensional dalam penelitian koperasi. Misalnya, topik penelitian mengenai budaya anggota dalam kategori mikro memiliki relevansi dengan isu-isu seperti perubahan demografi, kepatuhan anggota, serta promosi ekonomi anggota. Hal ini menunjukkan bahwa aspek budaya dalam koperasi dapat memengaruhi berbagai dinamika organisasi, baik pada tingkat individu maupun kelembagaan. Selain itu, pendekatan hierarkis dalam tabel ini memperlihatkan bagaimana penelitian koperasi dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek teknis operasional dalam kategori mikro, dinamika organisasi dalam kategori meso, hingga kebijakan dan dampak sosial ekonomi dalam kategori makro.

Implikasi dari pengelompokan ini cukup luas, terutama dalam penelitian dan kebijakan koperasi. Pendekatan penelitian yang diusulkan dalam tabel ini bersifat multidisiplin, mencakup bidang ekonomi, manajemen, serta kebijakan publik. Bagi koperasi, hasil penelitian yang masuk dalam kategori mikro dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi internal, sedangkan kategori makro lebih relevan untuk advokasi kebijakan dan pengembangan regulasi. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara skala mikro, meso, dan makro agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Keseluruhan struktur tabel ini memberikan panduan yang jelas bagi akademisi dan praktisi dalam meneliti koperasi dari berbagai perspektif. Dengan pendekatan berjenjang ini, penelitian yang dilakukan dapat lebih relevan dan aplikatif dalam kebijakan serta pengelolaan koperasi di berbagai tingkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis.com. (2024). Pengguna QRIS Cs Capai Rp5.335,33 Triliun, Tumbuh 17,19% pada Awal 2024. <https://finansial.bisnis.com/read/20240221/11/1742973/pengguna-qr-is-cs-capai-rp533533-triliun-tumbuh-1719-pada-awal-2024>. (Diakses pada tanggal 19 November 2024)
- CNNIndonesia. (2024). Survei Prediksi Pengguna Pinjol Naik Signifikan. <https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201125847-192-1057157/survei-prediksi-pengguna-pinjol-naik-signifikan>. (Diakses pada tanggal 20 November 2024)
- CNBC. (2014). Pasar Modal Kebanjiran Anak Muda, Bos LPS: Jangan FOMO <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230814161227-17-462814/pasar-modal-kebanjiran-anak-muda-bos-lps-jangan-fomo>. (Diakses pada tanggal 28 November 2024)
- Calahan, & Clark. (1988). *Educational Trust Fund*. Ohio: Ohio State University Hashim, M. K., & Fawzi, D. A. (2015). Issues, scope and focus of research on cooperatives in Malaysia. *Journal of Education and Social Sciences*, 2, 121-125.
- Growth Lab (2021). Country & Product Complexity Rankings. <https://atlas.hks.harvard.edu/rankings>. (Diakses pada tanggal 1 Desember 2024)
- Hashim, M. K., & Fawzi, D. A. (2015). Issues, scope and focus of research on cooperatives in Malaysia. *Journal of Education and Social Sciences*, 2, 121-125.
- ICCI. (2022). Survei Status SDM Koperasi, responden 614 koperasi, tidak dipublikasikan untuk kebutuhan Bappenas.
- Katadata. (2024). Ada 185 Juta Pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2024. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/de7b25bfae5971c/ada-185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024>. (Diakses pada tanggal 4 Desember 2024)
- Kemenkop UKM. (2022). Data Keragaan Koperasi Tahun 2022. Kemenkop UKM.
- Kemenkop UKM. (2023). Data Keragaan Koperasi Tahun 2023. Kemenkop UKM.
- MetroTV.com. (2023). OJK: 80% Pelajar di Indonesia Sudah Punya Rekening Tabungan di Bank <https://www.metrotvnews.com/read/koGCVMA5-ojk-80-pelajar-di-indonesia-sudah-punya-rekening-tabungan-di-bank> (Diakses pada tanggal 12 Desember 2024)

- Putra, F. (2023). Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 Bidang Koperasi. Bappenas.
- Startupranking. (2024). Top Indonesia. <https://www.startupranking.com/top/indonesia>. (Diakses pada Tanggal 15 Desember 2024)
- Subianto, P. 2023. Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. PT. Media Pandu Bangsa
- Vuotto, M. (2017). Content and scope of research on cooperatives: the performance of the Latin American Network of researchers on cooperatives. *Review of International Co-operation*, 14-25.
- World Bank, (2024). The Middle Income Trap. World Bank Report.
- Yusma, L. N. S., Sakti, D. P. B., & Furkan, L. M. (2021). Tata Kelola Koperasi di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2)..